



Membangun Ekonomi Kota Medan Mulai dari Peningkatan Sumber Daya Manusia di Daerah Pesisir

Muhammad Novan Prasetya*

Fakultas Ilmu Politik dan Pendidikan
Universitas Potensi Utama Medan, Indonesia

Diterima Pebruari 2018; Disetujui April 2018; Dipublikasikan Juni 2018

Abstrak

Kampung Nelayan is a Village located on the coast of Belawan just at the northern end of Medan City, is in a state of concern. This settlement does not involve the government nor the designer, so the community does not have a clear ownership letter. Fishermen's village become slala of one coastal region in Indonesia which has abundant natural resources, but the potential has not been optimally utilized caused by several factors, including low quality of Human Resources. Residents living in coastal areas generally live in poor economic conditions are indicated by the high incidence of poverty in the region. The livelihoods of coastal people, especially fishermen generally depend on the utilization of natural resources using limited technology and capital. Improving the quality of human resources must be planned properly to build this village as one of the factors that trigger the economy of Medan.

Keywords: *Kampung Nelayan, Human Resource Development; Coastal Area*

Abstract

Kampung Nelayan adalah sebuah Perkampungan yang berada di pesisir Belawan tepat di ujung Utara Kota Medan, berada dalam keadaan yang memprihatinkan. Perkampungan ini berdiri tidak melibatkan pemerintah maupun perancang, sehingga masyarakat tidak memiliki surat kepemilikan yang jelas. Kampung nelayan menjadi slala satu wilayah pesisir di Indonesia yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, tetapi potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. Penduduk yang tinggal di wilayah pesisir pada umumnya hidup dengan kondisi ekonomi yang masih memprihatinkan diindikasikan dari tingginya kasus kemiskinan di wilayah tersebut. Kehidupan penduduk di wilayah pesisir, khususnya nelayan pada umumnya tergantung pada pemanfaatan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi dan modal yang terbatas. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia tentunya perlu direncanakan dengan tepat untuk membangun kampung ini sebagai salah satu faktor pemicu perekonomian Kota Medan.

Kata Kunci: *Kampung Nelayan, Pembangunan Sumber Daya Manusia, Daerah Pesisir*

How to Cite: Prasetya, M.N. (2018). Membangun Ekonomi Kota Medan Mulai dari Peningkatan Sumber Daya Manusia di Daerah Pesisir. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1): 104-111.

*Corresponding author:

E-mail: muhammadnovanprasetya@gmail.com

ISSN 2085-482X (Print)

ISSN 2407-7429 (Online)

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat termasuk penggundulan hutan dan pencemaran. Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang berkesinambungan. Di wilayah pesisir terdapat sumber daya pesisir berupa sumber daya alam dan jasa lingkungan yang sangat kaya. Sumber daya tersebut meliputi: sumber daya yang dapat pulih (*renewable resources*) seperti ikan, mangrove, padang lamun dan terumbu karang; sumber daya tidak dapat pulih (*non-renewable resources*) seperti mineral, pasir laut dan garam; dan jasa lingkungan kelautan (*environmental services*) seperti wisata bahari dan transportasi laut serta benda berharga yang tenggelam di laut (Supriharyono, 2002).

Sumber daya alam di wilayah pesisir mempunyai arti penting bagi kegiatan perikanan, konservasi lingkungan, wisata bahari dan kegiatan jasa lingkungan terkait untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kekayaan sumber daya alam di wilayah pesisir ini apabila dipadukan dengan sumber daya manusia yang handal dan diperkuat dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan yang tepat bisa menjadi modal yang besar bagi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahkan sampai kepada peningkatan sebuah daerah/kota. Namun sayangnya pemanfaatan sumber daya alam dan manusia di wilayah pesisir belum optimal dan berkelanjutan.

Pemanfaatan potensi sumber daya alam di wilayah pesisir yang belum optimal dan berkelanjutan disebabkan oleh banyak faktor yang saling terkait satu sama lain yang dapat dikategorikan kedalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi internal sumber daya manusia pesisir dan nelayan, seperti: (1) rendahnya

tingkat penguasaan teknologi dan manajemen usaha, (2) pola usaha tradisional dan subsisten (hanya cukup memenuhi kehidupan jangka pendek), (3) keterbatasan kemampuan modal usaha, dan (4) kemiskinan masyarakat pesisir dan nelayan. Sedangkan faktor eksternal diantaranya: kebijakan pembangunan pesisir dan lautan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang masih bersifat sektoral dan parsial serta kurang memihak pada nelayan tradisional; kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena kegiatan penangkapan illegal (penggunaan bom dan potas); serta eksploitasi dan perusakan terumbu karang (penambangan karang). Selain itu, rendahnya kesadaran arti penting dan nilai strategis pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu juga menjadi penyebab kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir (Kusnadi, 2002).

Berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengentaskan kemiskinan di wilayah pesisir. Program pemberdayaan masyarakat pesisir yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1980-an diantaranya: 1) Motorisasi armada nelayan skala kecil yaitu program yang dikembangkan pada awal tahun 1980-an untuk meningkatkan produktivitas. Program motorisasi dilaksanakan di daerah padat nelayan, juga sebagai respons atas dikeluarkannya Keppres No. 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Pukat Harimau; 2) Pembangunan prasarana perikanan berupa pelabuhan perikanan berbagai tipe dan ukuran di seluruh Indonesia, mulai dari kelas yang sangat kecil yaitu pangkalan pendaratan ikan hingga kelas yang terbesar yaitu pelabuhan perikanan samudera. Pelabuhan perikanan tersebut, dibangun di desa-desa nelayan dan sentra-sentra produksi perikanan; 3) Program yang berhubungan dengan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup. Pembuatan karang buatan, penanaman kembali hutan bakau, konservasi kasawan laut dan jenis ikan tertentu, serta penegakan hukum terhadap kegiatan-kegiatan penangkapan ikan illegal dengan menggunakan bom, racun, dan alat tangkap ikan yang destruktif lainnya merupakan program-program pembangunan yang secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan nelayan; 4) Dari sisi kelembagaan dikembangkan juga pola-pola usaha

perikanan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Berbagai upaya dilakukan untuk memfasilitasi dan mengembangkan koperasi perikanan, KUD Mina, kelompok usaha bersama perikanan, kelompok nelayan, kelompok wanita nelayan, dan organisasi profesi nelayan. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut diharapkan menjadi katalisator percepatan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir; 5) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang diluncurkan pada tahun 2001. Program ini secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan permodalan, kelembagaan dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan. Program PEMP diinisiasi untuk mengatasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap perekonomian masyarakat pesisir, yang difokuskan pada penguatan modal melalui pengalangan Dana Ekonomi Produktif (DEP). Pengelolaan DEP dilakukan oleh Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) yang dibentuk sebagai perusahaan milik masyarakat pesisir (Duhuri, 2001).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses. Suatu proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan transformasi pengetahuan (Adisasmita, R, 2005). Pembangunan ekonomi daerah merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

Sebelum mengetahui makna pembangunan ekonomi daerah terlebih dahulu harus mengetahui pengertian daerah. Pengertian ditinjau dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu (Lincoln, 1999): 1) Daerah homogen adalah suatu daerah dimana kegiatan ekonomi terjadi diberbagai pelosok ruang dan terdapat sifat-sifat yang sama, baik dari segi pendapatan perkapitanya, sosial budayanya, geografinya, dan sebagainya; 2) Daerah nodal adalah suatu daerah sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi; 3) Daerah perencanaan atau daerah administrasi adalah suatu daerah sebagai suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Potensi ekonomi suatu daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat menolong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.

Salah seorang pelopor teori fungsionalis, Emile Durkheim, berpendapat bahwa pendidikan sebagai komponen utama pembangunan sumber daya manusia harus berfungsi sebagai wacana untuk mewariskan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dengan demikian, melestarikan dan memperkuat homogenitas masyarakat dengan mewajibkan konformitas sikap, perilaku dan keterampilan mereka dengan serangkaian aturan yang dituntut masyarakat. Melalui pendidikan individu-individu akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan untuk hidup dalam masyarakat yang makin complex. Menurut perspektif ini, kualitas manusia "diprogram" melalui pendidikan untuk dapat menyesuaikan dengan logika masyarakat industri dan tuntutan pasar (Moeljarto, 1995).

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji capaian dari berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan penduduk, dengan mengambil kasus Kampung Nelayan Labuhan belawan sebagai salah satu wilayah pesisir di Kota Medan. Selain mengkaji capaian program, tulisan ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia di Kampung Nelayan.

METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan tulisan ini penulis menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dokumen yang dihasilkan bisa melalui Data BPS dan buku literatur yang telah terekomendasi oleh beberapa peneliti yang memiliki data terstruktur serta pengambilan data dari website hasil yang efektif dalam penentuan kebijakan. Sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara, FGD dan observasi kegiatan penduduk dan kondisi desa. Dengan demikian melalui berbagai literatur dan observasi di lapangan akan dibuat suatu rekomendasi yang tepat untuk nantinya para masyarakat dan pemerintah untuk dapat mengembangkan sumber daya manusia di kampung nelayan, sebagai pondasi untuk membangun perekonomian Kota Medan dan dapat dijadikan suatu solusi sebagai implentasi nyata di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam hal kepanjangan setiap orang sudah mengalami persamaan bahwa SDM kepanjangan dari sumber daya manusia. Namun jika ditanya dari segi persepsi atau pengertian sumber daya manusia, maka terdapat jawaban yang beragam atau tidak jarang kita dibuat bingung mengenai

pengertiann SDM. Maka diperlukan pembahasan mengenai pengertian SDM agar kita memiliki pemahaman yang sama mengenai SDM. Ahmad Tohardi menyimpulkan bahwa; sumber daya manusia adalah segala potensi yang ada pada manusia baik berupa akal pikiran, tenaga, keterampilan, emosi, dan sebagainya yang dapat digunakan baik untuk dirinya maupun untuk organisasi atau perusahaan (Eman, 2012). Kesimpulan dari definisi tersebut bahwa sumber daya manusia adalah segala potensi yang di miliki manusia baik berupa daya pikir, tenaga, keterampilan, emosi, dan potensi lainya yang dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi keinginannya sendiri ataupun untuk mencapai tujuan organisasi atau bahkan sebuah negara.

Dalam kasus di kampung nelayan kita dapat melihat dari data tabel dibawah bahwa dari 29 responden masyarakat miskin yang paling dominan adalah yang berumur 30-39 tahun berjumlah 12 responden atau 36,93 persen atau dapat pula dikemukakan bahwa dari 19 responden yang berumur 30-39 tahun terdapat 12 responden atau sekitar 63.30 persen yang taraf hidup miskin. Data ini menunjukkan bahwa secara deskriptif ada pengaruh faktor umur terhadap kemiskinan (Fajriawati, 2015). Kita dapat menyimpulkan bahwa kurangnya pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di kampung nelayan.

Tabel 1
distribusi Responden Menurut Tingkat Umur
di Desa Nelayan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2015

No	Uraian	<= 29 tahun	30 - 39 tahun	> 40 tahun	Jumlah	Presentase
1	Tidak Miskin	6	7	7	20	36,70
2	Miskin	10	12	9	31	63,30
	Jumlah	16	19	16	51	100

Sumber : Data Primer Tahun 2015

Faktor-faktor Penghambat Peningkatan SDM

a. Pengelolaan Sumberdaya yang Tidak Optimal

Kampung nelayan sejatinya merupakan salah satu desa yang penyedia kebutuhan untuk konsumsi sumberdaya lautan untuk masyarakat kota Medan. Dapat dikatakan Kampung nelayan merupakan *hinterland* bagi masyarakat kota Medan dalam hal pemenuhan protein hewani berupa ikan laut. Penduduk Kampung Nelayan yang berprofesi sebagai nelayan umumnya menjual hasil

tangkapannya ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Labuhan utara dan dari situ para tengkulak memasarkan hasil tangkapan nelayan tersebut ke daerah-daerah lain, termasuk Medan. Namun pendapatan yang diterima dari hasil menjual ikan tangkapan tersebut tidaklah optimal. Masyarakat setempat (terutama nelayan) masih belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Terlebih untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya.

Nelayan di Kampung Nelayan masih menggunakan cara konvensional dalam

mengeksploitasi kekayaan yang ada di laut sekitar mereka. Cara yang digunakan seperti nelayan pada umumnya, yaitu pergi ke tengah laut dan menangkap ikan dengan cara menjala, memancing, menombak, memasang pukat, dan sebagainya. Dan hasilnya juga seperti biasa saja sebagaimana umumnya nelayan-nelayan di Indonesia. Parahnya lagi nelayan di Kampung nelayan memiliki kebiasaan memisahkan hasil tangkapannya antara ikan yang besar dan ikan yang kecil. Para nelayan cenderung hanya menjual hasil laut yang ukurannya besar dan membuang ikan-ikan kecil. Mereka menganggap hanya ikan besar yang memberikan hasil optimal dan ikan kecil tidak layak dijual.

Ini merupakan kekeliruan yang sangat fatal dari masyarakat. Seluruh ikan tangkapan nelayan (baik yang kecil maupun besar) sejatinya sama-sama memiliki nilai jual. Hanya saja terdapat perbedaan harga di TPI antara ikan dengan postur kecil dan ikan dengan postur besar. Ikan-ikan kecil dihargai lebih rendah dari harga ikan yang besar oleh tengkulak di TPI setempat. Akibatnya masyarakat enggan untuk menjual ikan kecil dan memilih untuk menjual ikan-ikan besar saja. Ikan-ikan kecil sejatinya dapat diolah dan dijual menjadi suatu produk komoditas baru yang bernilai jual lebih tinggi seperti ikan asin dan terasi. Polarisasi profesi pada sektor nelayan ditambah kurangnya wawasan menyebabkan masyarakat gamang akan pembaharuan. Tanpa ada pihak-pihak yang berusaha melakukan peningkatan SDM, mereka hanya cenderung mengikuti arus utama yang menjadi tradisi turun-temurun dari para pendahulunya.

b. Apresiasi Rendah Masyarakat Terhadap Pendidikan

Salah satu Faktor penting lainnya dari penyebab rendahnya kualitas SDM di kampung nelayan adalah rendahnya tingkat pendidikan yang juga menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di desa pesisir begitu pula di kampung nelayan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan memacu jalannya pembangunan dengan kualitas yang akan berdampak *multiplier* kepada masyarakat luas. Kualitas sumberdaya manusia dapat ditingkatkan dengan memacu intelegensi melalui jenjang pendidikan formal maupun non-formal (Mathis dan Jackson, 2002). Hal ini yang menjadi salah satu masalah sulitnya

mengembangkan ekonomi masyarakat Kampung nelayan. Apresiasi rendah masyarakat terhadap pendidikan menyebabkan mereka terjebak dalam kondisi perekonomian yang cenderung *statis*.

Masyarakatnya di Kampung nelayan umumnya mengesampingkan pendidikan dan cenderung meniru apa yang dilakukan orang tuanya atau orang-orang yang mereka anggap panutan. Termasuk para orang tua juga mengarahkan anaknya untuk tidak bersekolah tinggi agar dapat segera mencari penghasilan sendiri. Suatu fakta yang cukup menarik memang bahwa penduduk Kampung nelayan yang berprofesi sebagai nelayan sejatinya mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Secara ekonomi, mereka memiliki kemampuan untuk memberikan pendidikan yang memadai bagi anak-anaknya. Namun kecenderungan yang terlihat di lapangan bahwa sebagian besar anak-anak kampung ini tidak bersekolah. Mereka menganggap bahwasanya pendidikan itu tidak terlalu penting karena "*jika anak sudah mengenal duit jadi tidak ada lagi niat untuk sekolah*" itu lah kata yang sering terlontar di kalangan masyarakat kampung nelayan. Faktor inilah yang menyebabkan perekonomian masyarakat setempat tidak progresif. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara umum menyebabkan mereka sulit untuk melakukan inovasi dan kreasi terhadap sumberdaya alam yang ada, terlebih pada hasil tangkapan nelayan.

Masalah pendidikan adalah sumber daya manusia dalam pola pikir. Dengan pendidikan yang rendah tidak mampu untuk merubah pola pikir untuk berorientasi kedepan. Dimana tingkat pendidikan di lokasi penelitian rata-rata masih rendah yaitu mayoritas responden masih berpendidikan tamatan Sekolah Dasar dan hanya sedikit tamatan SLTA. (Fajriawati, 2015). Untuk lebih jelas kita lihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan Formal
Di Desa kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2015

No	Uraian	Tdk pernah/ Tamat SD	Tamat SD	SLTP/ SLTA	Jumlah	Peresentase
1	Tidak miskin	10	14	13	37	36.70
2	Miskin	23	16	18	57	63.30
	Jumlah	33	30	31	94	100

Sumber Data: Data Primer Tahun 2015

Langkah-langkah Peningkatkan SDM

a. Sumber Daya Manusia Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi

Saat kita berbicara mengenai peran sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi, terlebih dahulu mari kita bahas mengenai pembangunan ekonomi. Pada umumnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastuktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat (Sadono, 2011).

Dalam pembangunan ekonomi suatu daerah bahkan negara melibatkan faktor-faktor yang berperan penting, salah satunya adalah sumber daya manusia. Keadaan SDM suatu negara sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi negara tersebut. Untuk dapat mempercepat tingkat pembangunan ekonomi maka diperlukan SDM yang unggul diberbagai bidang. Minimal ada empat kebijakan pokok dalam upaya peningkatan sumberdaya manusia, yaitu : (1) Peningkatan kualitas hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani, rohani, dan kejuangan, maupun kualitas kehidupannya seperti perumahan dan pemukiman yang sehat; (2) Peningkatan kualitas SDM yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya; (3) Peningkatan kualitas SDM yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK yang berwawasan lingkungan, serta (4) Pengembangan pelantara yang meliputi kelembagaan dan perangkat hukum yang mendukung peningkatan kualitas SDM. Secara oprasional, upaya peningkatan kualitas SDM dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor pendidikan, kesehatan, kesejahtraan sosial, kependudukan, tenaga kerja, dan sektor-sektor pembangunan lainnya (Mulyadi S, 2003).

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan

Pengembangan SDM yang membawa misi sebagaimana disebutkan di atas difokuskan pada peningkatan ketahanan dan kompetensi setiap individu yang terlibat atau akan terlibat dalam proses pembangunan. Peningkatan ketahanan dan kompetensi ini di antaranya dilaksanakan melalui pendidikan. Bila dikaitkan dengan pengembangan SDM dalam rangka meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri, pendidikan juga merupakan upaya meningkatkan derajat kompetensi dengan tujuan agar pesertanya *adaptable* terhadap berbagai perubahan dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, pendidikan yang diselenggarakan seharusnya juga memberi bekal-bekal kemampuan dan keterampilan untuk melakukan suatu jenis pekerjaan tertentu yang dibutuhkan agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan (Boediono, 1994).

Sebagaimana dijelaskan di atas, pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses melakukan perubahan, dalam rangka perbaikan, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas sumber daya manusia. Kesejahteraan terkait dengan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup rakyat, baik material maupun mental dan spiritual. Adapun kualitas SDM terkait dengan derajat kemampuan, termasuk kreatifitas, dan moralitas pelaku-pelaku pembangunan. Atas dasar ini, proses perubahan yang diupayakan melalui pembangunan seharusnya menjangkau perbaikan semua sektor secara menyeluruh dan berimbang, pada satu sisi, dan pada sisi lain merupakan upaya meningkatkan kualitas SDM.

Di kampung nelayan, pendidikan sangat berperan sebagai agen perubahan dan membantu masyarakat mengatasi masalah-masalah sosial-ekonomi yang mereka alami. Di kampung nelayan dahulunya tidak ada tradisi menabung, asuransi dan penggunaan teknologi masa kini untuk meningkatkan produktifitas. Segala kegiatan

masyarakat berjalan secara tradisional dan alamiah. Hal ini dikarenakan arus informasi yang begitu tertutup disebabkan minimnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat serta sempitnya akses untuk menemukan informasi-informasi baru secara cepat dan terkini.

Lembaga pendidikan sejatinya bukan hal yang baru di kampung nelayan, dan hal ini di bantu dengan kehadiran para civitas akademika (dosen, mahasiswa dll). Beberapa perguruan tinggi di Sumatera Utara (baik negeri maupun swasta) banyak yang datang ke kampung nelayan untuk melakukan penelitian, sosialisasi ataupun bakti sosial. Para civitas yang berkunjung seringkali melakukan bakti sosial dan sosialisasi kepada masyarakat tentang optimalisasi hasil alam dan peningkatan SDM di kampung nelayan. Namun sayangnya tidak adanya kontinuitas dan kesinambungan dari program kunjungan tersebut. Bakti sosial hanya dilakukan sekali dan setelah itu tidak ada keberlanjutan dari program tersebut.

Pola ini yang seharusnya diubah oleh lembaga-lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta) ataupun pihak terkait dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Untuk melakukan perubahan pada masyarakat sejatinya butuh kerjakeras yang sungguh-sungguh karena untuk merubah karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Perlunya keberlanjutan dari suatu program pembinaan terhadap masyarakat agar masyarakat secara perlahan dan bertahap dapat merasakan manfaat dari hadirnya civitas akademika di tengah-tengah mereka.

Membangun Perekonomian dengan Berbasis Kelautan

Indonesia memang dikenal sebagai negara agraris yang masyarakatnya umumnya menggeluti sektor pertanian untuk pemenuhan kebutuhannya. Namun sebagai negara kepulauan yang terdapat banyak wilayah pesisir sudah sepatutnya Indonesia berdaulat dari sektor maritim. Wilayah pesisir yang menyajikan banyak sumberdaya alam dapat menjadi modal untuk membangun perekonomian. Sumber daya alam pesisir yang melimpah menjadikan ekonomi maritim sebagai salah sektor andalan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi. Namun hingga saat ini, sektor maritime belum memberikan peran yang berarti terhadap

perekonomian negara. Lemahnya peran sektor maritim menyebabkan sektor ini kurang diminati untuk dikembangkan baik oleh investor asing maupun lokal.

Prof. DR. Rokhmin Dahuri menggagas perlunya paradigma baru dalam membangun Indonesia yang berbasis kelautan. Profil pembangunan kelautan Indonesia kedepan adalah suatu sistem pembangunan yang memanfaatkan ekosistem laut beserta segenap sumberdayanya untuk kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan (*on a sustainable basis*). Tujuan pembangunan kelautan hendaknya tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) melainkan untuk mewujudkan kemakmuran, pemerataan kesejahteraan (*social equity*) dan terpeliharanya daya dukung dan kualitas lingkungan pesisir serta lautan secara proporsional (Yuswar, 2007).

Gagasan paradigma pembangunan ini selain mendasarkan pada potensi, peluang, permasalahan, kendala dan kondisi pem/bangunan kelautan juga mempertimbangkan pengaruh lingkungan strategis terhadap pembangunan nasional. Letak geografis dan kandungan sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia memberikan pengakuan bahwa Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia (Departemen Perikanan dan Kelautan, 2005).

Dengan luas laut yang jauh melebihi luas daratannya menyebabkan Indonesia sarat akan potensi sumberdaya laut yang sangat besar. Kondisi geografis ini diperkukan dengan kenyataan bahwa Indonesia berada dalam kawasan geopolitik yaitu Pasifik dan Hindia yang merupakan kawasan yang paling dinamis dalam hubungan politik, pertahanan dan keamanan dunia.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan model pembangunan berkelanjutan yang mencakup konteks pengelolaan sumberdaya berbasis kelautan yang tertuang dalam konsep pembangunan kelautan berkelanjutan (*sustainable marine development*). Konsep ini secara teknis merupakan suatu upaya pemanfaatan dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir untuk kesejahteraan manusia yang menjadi *stakeholders* dari pembangunan tersebut. Selain itu terdapat beberapa alasan yang memperkuat mengapa ekonomi kelautan harus dijadikan arus utama pembangunan nasional baik dalam sosial

politiknya, diantaranya: 1) Melimpahnya sumberdaya kelautan dan perikanan menyebabkan hal tersebut menjadi keunggulan komparatif sekaligus kompetitif yang sangat tinggi; 2) Sumberdaya kelautan merupakan sumberdaya yang senantiasa dapat diperbaharui (*renewable resources*) sehingga keunggulan komparatif dan kompetitif ini dapat bertahan lama asalkan dikelola secara arif dan bijaksana; 3) Keterkaitan kuat antara industr berbasis kelautan dengan industri dan aktivitas ekonomi lainnya. Dengan mengembangkan industr kelautan maka akan mendoorng aktivitas ekonomi sektor lainnya seperti usaha transportasi laut, komunikasi, perdagangan, dan sebagainya

Pembangunan berbasis sumber daya kelautan merupakan suatu konsep strategis yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi yang terjadi di negara ini. Maka dari itu, konsep ini harus dikembangkan guna memperkuat dan memperkokoh struktur perekonomian nasional. Dengan memanfaatkan ekonomi masyarakat wilayah pesisir seperti Kampung nelayan maka denyut perekonomian nasional akan terpacu seiring dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya kelautan tersebut.

SIMPULAN

Sebagai desa yang terletak di kawasan pesisir, kampung nelayan memiliki sumberdaya alam yang sangat melimpah baik dari sektor maritim maupun agraria. Namun kekayaan tersebut belum mampu dimanfaatkan masyarakat setempat secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraannya. Masyarakat Desa Percut terjerat dalam jebakan kemiskinan structural dan kemiskinan kultural. Hal ini menyebabkan roda perekonomian masyarakat yang berjalan sangat lamban, di tambah dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya perhatian dari berbagai pihak (khususnya pemerintah dan akademisi) dalam hal pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi faktor pemicu hal tersebut. Maka itu untuk melakukan perubahan pada masyarakat pesisir kampung nelayan dibutuhkan suatu proses dan peran pemerintah Kota Medan, akademisi dan masyarakat umum sebagai agen perubahan guna membangun masyarakat pesisir yang berdaya dan mandiri. Sebagai negara kepulauan terbesar di

dunia Indonesia memiliki potensi wilayah pesisir yang cukup besar dan Kota Medan menjadi salah satu tempat yang mendapat keberkahan itu jadi sudah semestinya mampu di manfaatkan dengan baik. Wilayah pesisir sejatinya jika dikelola secara optimal akan menciptakan dampak yang signifikan dalam memajukan perekonomian. Pembangunan ekonomi Kota Medan kedepannya haruslah berorientasi pada pembangunan kelautan berkelanjutan (*sustainable marine development*) untuk memainkan peran dan potensi yang ada di lautan secara optimal, sehingga kelak selogan "Jalesveva Jayamahe" (Di Lautan Kita Jaya) akan benar-benar menjadi kenyataan bukan hanya sekedar slogan pemanis.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN.
- Departemen Perikanan dan Kelautan. 2005.
- Faustino Cardos, G. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta,
- Irawan, M.S. (1995). *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Lima, Cetakan ke Empat, Yogyakarta, Penerbit BPFE.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan, Teori, masalah dan kebijakan*. Cetakan pertama, unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN Yogyakarta.
- Lubis, Y.A., (2014). Studi Tentang Aktivitas Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai di Pelabuhan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2): 148-155
- Mathis & Jackson. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Salemba Empat.
- Reksodiprodjo, S. (2000). *Pengertian Produktivitas*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Siregar, N.S.S. (2016). Tingkat Kesadaran Masyarakat Nelayan terhadap Pendidikan Anak, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 4 (1): 1-10.
- Suharyanto, A. Devi A.S. Juanda. Supriadi P.P. Syafriyeni T. Toho C.M.S. (2017). Persepsi Masyarakat Nelayan mengenai Pendidikan di Desa Paluh Kurau, Hampan Perak, Deli Serdang, *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 3 (1): 11-18
- Zainul, Y. (2007). *Bunga Rampai Pembangunan Ekonomi Pesisir*. Universitas Trisakti: Jakarta.